



Kepemimpinan Keluarga dalam Al-Qur'an dan Transformasi Relasi Keluarga Perkotaan: Perspektif *Tafsir Al-Azhar* Karya Hamka

Nurhamida Hasibuan*

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: nhamida343@gmail.com

Histori Naskah	Diserahkan	Direvisi	Diterima	Tersedia Online
	03 Juli 2026	07 Agustus 2026	10 September 2026	29 September 2026

Abstract

The dynamics of urban family relations demonstrate shifts in authority, role negotiations, and the intensification of equality values that often clash with Qur'anic norms regarding family leadership. The focus of this study is the concept of *qiwamah* in Hamka's *Tafsir al-Azhar* and its relevance in a pluralistic, complex modern context. A qualitative approach based on literature studies is used, employing thematic and contextual interpretation analysis to examine verses on family leadership and Hamka's interpretation within a socio-cultural framework. The results of this study reinterpret *qiwamah* as ethical leadership grounded in responsibility, moral capacity, and competence, rather than in gender-based structural domination. Hamka's interpretation displays conceptual flexibility that creates space for a proportional distribution of roles in urban families, while emphasizing the principles of justice, deliberation, and collective responsibility. The dialectic between text and context demonstrates the integration of Qur'anic normative values with contemporary social realities through adaptive readings that maintain the substance of the teachings without ignoring social change. These findings strengthen the position of contextual interpretation as an approach capable of bridging the tension between religious norms and the transformation of the modern family, while also providing theoretical contributions to the development of thematic interpretation studies and Islamic family studies in the global urban landscape.

Keywords: *Qiwamah*; *Tafsir al-Azhar*; Hamka; Urban Family; Contextual Interpretation

Abstrak

Dinamika relasi keluarga urban memperlihatkan pergeseran otoritas, negosiasi peran, serta intensifikasi nilai kesetaraan yang sering berhadapan dengan norma Al-Qur'an mengenai kepemimpinan keluarga. Fokus kajian diarahkan pada konsep *qiwamah* dalam *Tafsir al-Azhar* karya Hamka serta relevansinya dalam konteks modern yang plural dan kompleks. Pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan digunakan melalui analisis tafsir tematik dan kontekstual dengan menelaah ayat-ayat kepemimpinan keluarga serta penafsiran Hamka dalam kerangka sosial-budaya. Hasil kajian menunjukkan reinterpretasi *qiwamah* sebagai kepemimpinan etis yang berlandaskan tanggung jawab, kapasitas moral, dan kompetensi, bukan dominasi struktural berbasis jenis kelamin. Penafsiran Hamka menampilkan fleksibilitas konseptual yang membuka ruang bagi distribusi peran secara proporsional dalam keluarga urban, sekaligus menegaskan prinsip keadilan, musyawarah,

dan tanggung jawab kolektif. Dialektika antara teks dan konteks memperlihatkan integrasi nilai normatif Al-Qur'an dengan realitas sosial kontemporer melalui pembacaan adaptif yang menjaga substansi ajaran tanpa mengabaikan perubahan sosial. Temuan ini memperkuat posisi tafsir kontekstual sebagai pendekatan yang mampu menjembatani ketegangan antara norma keagamaan dan transformasi keluarga modern, sekaligus memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi tafsir tematik dan kajian keluarga Islam dalam lanskap urban global.

Kata Kunci: *Qiwāmah*; *Tafsir al-Azhar*; Hamka; Keluarga Urban; Tafsir Kontekstual

Pendahuluan

Keluarga menempati posisi sentral dalam konstruksi sosial dan pembentukan nilai moral individu. Perubahan struktur sosial modern menghadirkan tantangan serius terhadap pola kepemimpinan keluarga yang selama ini berakar pada nilai normatif agama (Pratiwi et al., 2026). Kepemimpinan keluarga dalam Al-Qur'an selama ini dipahami melalui konsep *qiwāmah* yang sering diasosiasikan dengan otoritas laki-laki (Munirah et al., 2026). Pemahaman ini mengalami pergeseran makna seiring perubahan kondisi sosial, terutama pada masyarakat urban yang cenderung menuntut relasi setara dan fleksibel (Evans, 2018). Situasi ini memunculkan ketegangan antara prinsip normatif teks keagamaan dan praktik relasi keluarga kontemporer. *Tafsir al-Azhar* karya Hamka menawarkan pendekatan kontekstual yang membuka ruang interpretasi lebih dinamis terhadap konsep kepemimpinan keluarga. Kajian terhadap tafsir ini menjadi penting untuk memahami bagaimana nilai Qur'ani dapat tetap relevan di tengah transformasi relasi keluarga modern.

Realitas keluarga perkotaan menunjukkan perubahan signifikan dalam struktur dan pola relasi. Peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor publik mendorong lahirnya keluarga dengan dua sumber penghasilan. Pola ini berdampak pada distribusi peran domestik yang tidak lagi bersifat tunggal (Buyukkececi et al., 2025). Urbanisasi mempercepat individualisasi anggota keluarga sehingga interaksi menjadi lebih terbatas dan fungsional (Rasool, 2024). Tingkat perceraian di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding wilayah rural (Mansour, Saleh, & Al-Awadhi, 2020). Konflik peran antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga sering memicu ketegangan relasi suami-istri. Otoritas keluarga mengalami pergeseran dari model hierarkis menuju negosiasi berbasis kesepakatan (Pluut et al., 2022). Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara nilai normatif yang menekankan tanggung jawab kepemimpinan dengan praktik sosial yang menuntut kesetaraan. Fenomena ini menegaskan urgensi kajian yang mampu menjembatani teks keagamaan dengan realitas sosial yang terus berubah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas kepemimpinan keluarga dalam perspektif Al-Qur'an dan tafsir. Studi Awalul et al. (2025) menunjukkan konsep *qiwāmah* sebagai bentuk tanggung jawab ekonomi dan perlindungan moral dalam keluarga. Tafkir, Hidayat, dan Ayob (2026) menekankan dimensi patriarkal

dalam interpretasi klasik yang menempatkan laki-laki sebagai otoritas utama. Kajian Fatimah dan Ikram (2025) mengarah pada reinterpretasi *qiwamah* dalam perspektif kesetaraan gender dengan menekankan prinsip keadilan dan musyawarah. Loginov (2021) mengkaji dinamika keluarga urban dan menemukan adanya pergeseran relasi menuju pola egaliter yang sering tidak diiringi dengan stabilitas nilai. Mujahidin, Itmam, dan Rofiq (2024) membahas *Tafsir al-Azhar* sebagai tafsir kontekstual yang responsif terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia. Kelima penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, namun belum mengintegrasikan analisis mendalam antara konsep kepemimpinan Qur'ani dalam *Tafsir al-Azhar* dengan transformasi relasi keluarga perkotaan secara komprehensif. Kekosongan ini membuka ruang penelitian yang menempatkan tafsir Hamka sebagai kerangka analisis untuk membaca dinamika keluarga urban.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimana konsep kepemimpinan keluarga dalam Al-Qur'an menurut *Tafsir al-Azhar*; bagaimana karakter relasi keluarga dalam masyarakat perkotaan; bagaimana dinamika interaksi antara konsep normatif tersebut dengan realitas sosial modern; bagaimana konstruksi relasi keluarga yang dapat dipahami melalui pendekatan tafsir Hamka dalam konteks kekinian? Tujuan penelitian diarahkan untuk mengungkap konsep kepemimpinan keluarga secara mendalam serta menganalisis relevansinya dalam perubahan sosial urban. Argumen awal penelitian ini bertumpu pada asumsi bahwa tafsir kontekstual memiliki kapasitas untuk menjembatani kesenjangan antara teks normatif dan praktik sosial. Kontribusi penelitian diharapkan memberikan penguatan teoretis dalam kajian tafsir tematik serta menawarkan perspektif baru dalam studi keluarga Islam kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi memperkaya diskursus akademik terkait relasi agama dan perubahan sosial dengan menghadirkan analisis yang kritis, sistematis, dan relevan dengan perkembangan masyarakat modern.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan penguatan analisis tafsir tematik (*mawḍūʿī*) yang dipadukan secara integratif dengan pembacaan hermeneutik kontekstual untuk menghubungkan teks Al-Qur'an, penafsiran Hamka dalam *Tafsir al-Azhar*, dan realitas relasi keluarga perkotaan. Sumber data primer berupa *Tafsir al-Azhar* karya Hamka, khususnya pada ayat-ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan keluarga, sedangkan sumber data sekunder meliputi literatur tafsir klasik dan kontemporer, kajian sosiologi keluarga urban, serta artikel ilmiah relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap ayat-ayat tematik, identifikasi unit makna dalam penafsiran Hamka, klasifikasi konsep kepemimpinan keluarga, serta pengayaan konteks melalui literatur sosial modern. Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data untuk menyaring konsep utama, kategorisasi tematik untuk memetakan pola kepemimpinan, analisis kontekstual

untuk mengaitkan tafsir dengan dinamika keluarga urban, serta analisis kritis-komparatif guna menguji fleksibilitas dan batas interpretasi Hamka dalam merespons perubahan relasi keluarga, sehingga menghasilkan pembacaan yang integratif antara teks normatif dan realitas sosial kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Kepemimpinan Keluarga dalam Al-Qur'an Perspektif *Tafsir Al-Azhar*

Pembacaan Hamka atas Surah al-Nisā': 34 menempatkan *qiwāmah* sebagai konstruksi etis yang berakar pada amanah, bukan legitimasi kekuasaan yang menundukkan. Frasa "*al-Rijāl qawwāmūna 'alā al-Nisā'*" ditafsirkan melalui pendekatan kontekstual yang mengaitkan teks dengan realitas sosial serta prinsip keadilan Qur'ani. Hamka (1990) menolak reduksi makna *qiwāmah* menjadi superioritas ontologis laki-laki, lalu mengalihkannya ke ranah tanggung jawab yang menuntut kapasitas moral dan kesiapan berkorban. Argumentasi dibangun dengan menekankan dua basis yang disebut dalam ayat, yakni kelebihan fungsional dan kewajiban nafkah, yang dipahami sebagai syarat sosial-historis, bukan justifikasi absolut. Perspektif ini memindahkan titik tekan dari hak menuju beban etik, sehingga kepemimpinan keluarga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan dan pengayoman. Penafsiran demikian menghadirkan relasi yang lebih dialogis karena otoritas bergantung pada integritas dan komitmen terhadap kemaslahatan anggota keluarga.

Eksposisi Hamka terhadap ayat yang sama juga mengelaborasi dimensi psikologis dan spiritual dalam praktik kepemimpinan domestik. *Qiwāmah* tidak dilepaskan dari kualitas akhlak, sebab legitimasi kepemimpinan hanya sah ketika disertai keteladanan yang konkret. Penekanan ini menggeser orientasi tafsir dari struktur hierarkis menuju etika relasional yang mengutamakan empati, komunikasi, dan tanggung jawab kolektif. Frasa lanjutan mengenai perempuan salehah ditafsirkan sebagai indikator harmoni yang lahir dari kerja sama, bukan kepatuhan pasif. Hamka (1990) mengkritik pembacaan literal yang menjadikan teks sebagai alat dominasi, lalu mengajukan pendekatan integratif yang memadukan nilai keadilan, kasih sayang, dan keseimbangan peran. Kerangka demikian menghasilkan konsepsi kepemimpinan yang dinamis karena peran laki-laki tidak dipandang statis, melainkan bergantung pada kemampuan menjalankan amanah secara proporsional. Relasi keluarga pun dipahami sebagai ruang pendidikan moral, sehingga otoritas menjadi sarana pembinaan, bukan instrumen kontrol sepihak.

Penafsiran terhadap Surah al-Taḥrīm: 6 memperkuat orientasi etis tersebut dengan menegaskan tanggung jawab kolektif dalam menjaga keluarga dari kerusakan moral. Seruan "*qu anfusakum wa ahlikum nārā'*" dipahami sebagai mandat preventif yang menuntut kepemimpinan berbasis pembinaan nilai. Hamka (1990) mengartikulasikan ayat ini sebagai kewajiban pendidikan spiritual yang tidak dapat direduksi menjadi perintah normatif semata. Kepemimpinan keluarga diarahkan pada proses internalisasi iman, pembiasaan etika, serta pengawasan yang bersifat

konstruktif. Perspektif ini menolak model otoritarian karena pembinaan moral membutuhkan pendekatan persuasif dan keteladanan yang konsisten. Dengan demikian, *qiwāmah* tidak hanya terkait aspek material seperti nafkah, tetapi juga mencakup tanggung jawab menjaga kualitas religius keluarga. Integrasi antara dimensi material dan spiritual menciptakan paradigma kepemimpinan yang holistik, sehingga keluarga berfungsi sebagai basis pembentukan karakter yang berkelanjutan.

Perbandingan dengan tafsir klasik menunjukkan pergeseran signifikan dalam konstruksi makna *qiwāmah*. Tradisi tafsir terdahulu cenderung menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dengan legitimasi normatif yang relatif tidak dipersoalkan. Hierarki dipertahankan melalui argumen kelebihan bawaan yang diasosiasikan dengan rasionalitas dan kekuatan fisik (Salam, Nasution, & Siregar, 2026). Hamka (1990) mengintervensi kerangka ini dengan menggeser basis legitimasi dari atribut biologis menuju kapasitas moral dan tanggung jawab sosial. Pembaruan tersebut tidak menafikan struktur peran, melainkan menafsir ulang fondasinya agar selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pendekatan ini menciptakan ruang bagi relasi yang lebih egaliter tanpa menghapus diferensiasi fungsi. Kritik implisit terhadap tafsir klasik terletak pada penolakan terhadap absolutisasi otoritas, sehingga kepemimpinan dipahami sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara etis.

Konseptualisasi *qiwāmah* dalam *Tafsir al-Azhar* juga memperlihatkan keterkaitan erat antara kepemimpinan dan praksis sosial. Hamka (1990) membaca teks Al-Qur'an dalam dialog dengan realitas masyarakat modern yang mengalami transformasi relasi gender dan struktur keluarga. Kepemimpinan tidak dapat dipertahankan melalui pola lama yang kaku, karena perubahan sosial menuntut fleksibilitas dalam distribusi peran. Penekanan pada tanggung jawab membuka kemungkinan partisipasi aktif perempuan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga tanpa menghilangkan prinsip keseimbangan. Argumen ini menegaskan bahwa otoritas bukan monopoli, melainkan fungsi yang dapat dijalankan secara kolaboratif selama tujuan kemaslahatan tercapai. Kerangka demikian menghadirkan model kepemimpinan yang adaptif, sehingga relevan dengan dinamika keluarga perkotaan yang kompleks. Orientasi ini sekaligus memperkuat posisi keluarga sebagai institusi yang responsif terhadap perubahan tanpa kehilangan landasan normatif.

Dinamika Relasi Keluarga Perkotaan dalam Perspektif Sosial Kontemporer

Perubahan konfigurasi sosial perkotaan menggeser fondasi relasi keluarga dari pola hierarkis menuju interaksi yang semakin negosiatif, ditopang oleh rasionalitas instrumental dan tuntutan efisiensi hidup urban. Intensifikasi mobilitas, kompetisi ekonomi, serta penetrasi nilai individualisme membentuk preferensi relasional yang lebih cair dan berbasis kesepakatan, bukan sekadar legitimasi tradisional (Yuki & Schug, 2020). Otoritas orang tua tidak lagi dipersepsi sebagai

struktur yang *taken for granted*, melainkan sebagai hasil dari proses tawar-menawar simbolik yang melibatkan pengakuan, kompetensi, dan kontribusi aktual dalam rumah tangga. Kerangka ini selaras dengan pembacaan Giddens (1984) mengenai transformasi keintiman yang menekankan "*pure relationship*" sebagai relasi yang dipertahankan sejauh memberi kepuasan timbal balik. Implikasi konseptualnya mengarah pada reduksi stabilitas normatif, karena legitimasi relasi menjadi kontingen pada performativitas keseharian, bukan pada kerangka nilai yang bersifat tetap. Kondisi ini memperluas ruang otonomi anggota keluarga, sekaligus membuka potensi konflik laten ketika ekspektasi tidak terkelola melalui mekanisme komunikasi yang memadai.

Kemunculan keluarga dengan dua pencari nafkah mempercepat rekonfigurasi pembagian kerja domestik dan publik, sekaligus menantang skema pembagian peran berbasis gender yang mapan. Keterlibatan simultan suami dan istri dalam sektor formal mengubah logika pengelolaan rumah tangga dari model komplementer menuju model kooperatif-negosiatif, di mana distribusi tugas menjadi objek perundingan berkelanjutan (Carlson & Hans, 2020). Dinamika ini tidak selalu berujung pada kesetaraan substantif, karena residu norma patriarkal tetap bekerja melalui ekspektasi kultural yang menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab utama ranah domestik. Akibatnya muncul fenomena beban ganda dan kelelahan kronis yang berdampak pada kualitas relasi interpersonal (Saaka & Luginaah, 2025). Perspektif Hochschild dan Machung (1989) tentang "*second shift*" relevan untuk menjelaskan ketimpangan laten dalam keluarga modern, di mana partisipasi ekonomi perempuan tidak otomatis menghapus asimetri domestik. Ketegangan antara tuntutan profesional dan tanggung jawab keluarga memproduksi konflik peran yang berulang, memerlukan strategi adaptif yang sering kali bersifat pragmatis, bukan normatif.

Modernitas perkotaan juga memicu restrukturisasi pola pengasuhan anak melalui mediasi teknologi dan institusionalisasi fungsi keluarga. Delegasi sebagian fungsi pengasuhan kepada lembaga pendidikan, pengasuh profesional, serta perangkat digital menciptakan jarak interaksional antara orang tua dan anak. Relasi yang terbentuk cenderung bersifat episodik dan terfragmentasi, karena waktu berkualitas digantikan oleh interaksi singkat yang terjadwal (Lubiewska et al., 2023). Dalam kerangka teori waktu sosial, komodifikasi waktu keluarga menjadi konsekuensi logis dari ekonomi berbasis produktivitas tinggi, di mana setiap jam memiliki nilai ekonomi (Barassi, 2020). Kondisi ini berpotensi menggerus kedalaman komunikasi, menghambat internalisasi nilai, dan mengurangi kohesi emosional. Anak berkembang dalam lingkungan yang kaya stimulasi informasi, namun miskin dialog reflektif yang berkelanjutan. Fragmentasi ini memperbesar risiko disonansi nilai antara generasi, terutama ketika arus informasi digital menghadirkan referensi alternatif yang tidak selalu sejalan dengan ekspektasi orang tua.

Krisis otoritas dalam keluarga urban tidak dapat dilepaskan dari perubahan sumber legitimasi yang bergeser dari tradisi menuju rasionalitas komunikatif. Otoritas kini menuntut justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara argumentatif, bukan sekadar klaim posisi. Dalam kerangka Habermas (1989), tindakan komunikatif menjadi prasyarat tercapainya konsensus yang sah, sehingga relasi keluarga idealnya beroperasi melalui dialog yang bebas dari dominasi. Namun praktik sehari-hari sering memperlihatkan ketidakseimbangan kompetensi komunikatif antaranggota, memicu distorsi komunikasi yang berujung pada konflik berkepanjangan. Orang tua yang tidak mampu mengartikulasikan alasan secara persuasif menghadapi resistensi, sementara anak yang terpapar berbagai sumber pengetahuan eksternal memiliki perangkat argumentasi yang lebih luas (Visscher, Boele, & Denissen, 2023). Ketegangan ini memperlemah efektivitas kontrol sosial internal keluarga, sekaligus membuka ruang bagi otoritas alternatif yang berasal dari media, teman sebaya, dan figur publik.

Konflik peran menjadi fenomena struktural dalam keluarga urban, bukan sekadar deviasi individual. Interseksi antara tuntutan pekerjaan, aspirasi personal, dan kewajiban keluarga menghasilkan tekanan multidimensional yang sulit direkonsiliasi tanpa dukungan institusional yang memadai. Model organisasi kerja yang menuntut fleksibilitas tinggi sering berkontradiksi dengan kebutuhan stabilitas keluarga, sehingga individu terjebak dalam dilema alokasi waktu dan energi (Glavin, Schieman, & Bierman, 2024). Strategi *coping* yang berkembang cenderung bersifat jangka pendek, seperti *outsourcing* pekerjaan domestik atau penjadwalan ketat aktivitas keluarga, yang tidak selalu menyentuh akar persoalan. Di sisi lain, internalisasi nilai kesuksesan berbasis karier memperkuat prioritas pada pencapaian profesional, menggeser orientasi dari kolektivitas keluarga menuju performa individu. Ketika ekspektasi tidak sinkron, konflik menjadi tak terhindarkan dan berpotensi merusak kualitas relasi jangka panjang.

Realitas keluarga urban memperlihatkan ketidaksinkronan antara praktik sosial dan horizon normatif agama, terutama dalam hal pembagian peran, otoritas, dan mekanisme pengambilan keputusan. Rasionalitas pragmatis yang mendominasi kehidupan kota mendorong adaptasi yang sering mengabaikan kerangka nilai transenden, sehingga keputusan keluarga lebih ditentukan oleh pertimbangan efisiensi dan utilitas. Ketegangan ini termanifestasi dalam bentuk penundaan, selektivitas, dan reinterpretasi yang bersifat situasional. Hasilnya adalah konfigurasi relasi yang hibrid, menggabungkan elemen tradisional dan modern tanpa integrasi konseptual yang utuh. Kondisi demikian menuntut pembacaan kritis terhadap bagaimana norma agama dinegosiasikan dalam praktik sehari-hari, serta bagaimana keluarga membangun justifikasi atas pilihan yang diambil. Ketika negosiasi tidak dilandasi kerangka etik yang konsisten, risiko disorientasi nilai meningkat dan kohesi keluarga menjadi rentan terhadap tekanan eksternal yang terus berubah.

Dialektika Kepemimpinan Qur'ani dan Relasi Keluarga Urban dalam *Tafsir Al-Azhar*

Ketegangan antara norma kepemimpinan Qur'ani dan dinamika relasi keluarga urban memunculkan ruang dialektis yang menuntut pembacaan kontekstual tanpa kehilangan pijakan normatif. Transformasi struktur sosial perkotaan, termasuk meningkatnya partisipasi ekonomi perempuan, perubahan pola otoritas domestik, serta rasionalisasi hubungan keluarga, menggeser pola relasi yang sebelumnya hierarkis menuju konfigurasi yang lebih negosiatif. *Tafsir al-Azhar* karya Hamka menampilkan upaya sistematis untuk merespons pergeseran ini melalui penafsiran yang mempertahankan legitimasi teks sekaligus membuka ruang adaptasi kontekstual. Kerangka hermeneutik Hamka mengaktifkan dimensi etis Al-Qur'an sebagai landasan relasional yang dinamis. Pendekatan ini memungkinkan rekonstruksi makna kepemimpinan keluarga bergerak ke arah fungsi moral dan tanggung jawab sosial yang relevan dengan realitas urban modern.

Orientasi kontekstual dalam *Tafsir al-Azhar* memperlihatkan upaya untuk menyeimbangkan otoritas simbolik laki-laki dengan prinsip keadilan relasional. Hamka (1990) menempatkan kepemimpinan sebagai amanah yang diukur melalui kapasitas moral, tanggung jawab ekonomi, serta komitmen terhadap kesejahteraan keluarga. Perspektif ini menggeser titik berat *qiwāmah* dari status ke fungsi, sehingga membuka kemungkinan reinterpretasi dalam konteks keluarga urban yang menuntut fleksibilitas peran. Relasi suami-istri tidak lagi dipahami dalam kerangka subordinasi, melainkan sebagai kemitraan yang menuntut kontribusi timbal balik. Formulasi semacam ini tidak meniadakan struktur normatif, tetapi menegosiasikan ulang bentuk operasionalnya agar selaras dengan perubahan sosial. Ketegangan antara teks dan konteks diolah melalui pendekatan etis yang menekankan substansi nilai dibanding bentuk formal yang rigid.

Dialektika antara *qiwāmah* dan prinsip kesalingan memperoleh artikulasi yang lebih kompleks dalam konteks keluarga modern. Hamka (1990) secara implisit mengakui kebutuhan akan relasi yang berbasis musyawarah dan penghargaan terhadap kapasitas individual anggota keluarga. Prinsip kesalingan diposisikan sebagai mekanisme internal yang memperkuat legitimasi kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan yang tidak mengakomodasi kesalingan berpotensi kehilangan relevansi sosial dan etis. Di sisi lain, kesalingan tanpa struktur normatif berisiko menghasilkan relasi yang kehilangan arah tanggung jawab (Adams & Miller, 2022). Integrasi keduanya menciptakan model relasi yang adaptif sekaligus terikat pada nilai Qur'ani. Hamka menunjukkan sensitivitas terhadap perubahan peran gender tanpa mengorbankan kerangka moral yang menjadi fondasi ajaran. Strategi ini menandai upaya untuk menjaga kontinuitas nilai di tengah disrupsi sosial yang intens.

Batas adaptabilitas tafsir Hamka menjadi titik kritis dalam membaca relevansi pendekatan kontekstualnya. Fleksibilitas interpretatif yang ditawarkan membuka

ruang inovasi dalam memahami relasi keluarga, namun sekaligus menghadirkan potensi reduksi makna jika tidak dikontrol oleh prinsip normatif yang kuat. Penekanan pada konteks sosial dapat mengarah pada relativisasi nilai jika tidak disertai dengan kerangka epistemologis yang konsisten (Rawluk et al., 2019). Hamka tampak berhati-hati dalam menjaga keseimbangan ini dengan tetap merujuk pada prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kesejahteraan sebagai parameter utama. Meskipun demikian, perkembangan sosial kontemporer yang lebih kompleks dibandingkan masa Hamka menuntut pembacaan lanjutan terhadap batas-batas tersebut. Ketegangan antara adaptasi dan konservasi nilai menjadi isu yang tidak sepenuhnya terselesaikan, melainkan terus bergerak dalam ruang interpretasi yang terbuka.

Kritik terhadap pendekatan kontekstual Hamka dapat diarahkan pada kemungkinan terjadinya simplifikasi terhadap struktur normatif jika tekanan terhadap relevansi sosial menjadi terlalu dominan. Reduksi ini dapat muncul dalam bentuk reinterpretasi yang terlalu menekankan kesetaraan fungsional tanpa mempertimbangkan kerangka nilai yang mendasari konsep kepemimpinan Qur'ani. Risiko lain terletak pada potensi inkonsistensi dalam penerapan prinsip kesalingan ketika berhadapan dengan realitas sosial yang tidak selalu ideal. Tafsir yang terlalu fleksibel dapat kehilangan daya regulatifnya, sehingga gagal memberikan pedoman yang jelas dalam situasi konflik keluarga (İsrafiloğlu, 2025). Kritik ini tidak menafikan kontribusi Hamka, melainkan menegaskan perlunya penguatan kerangka metodologis yang mampu menjaga integritas nilai dalam proses adaptasi. Dialektika antara norma dan konteks menuntut keseimbangan yang tidak mudah dicapai, terutama dalam lanskap sosial yang terus berubah.

Kekuatan utama *Tafsir al-Azhar* mampu membangun jembatan antara teks suci dan realitas sosial melalui pendekatan yang etis, rasional, dan kontekstual. Hamka berhasil menghindari dua ekstrem, yakni literalisme yang kaku dan relativisme yang berlebihan. Model interpretasi yang ditawarkan memungkinkan pembacaan ulang terhadap konsep kepemimpinan keluarga dengan mempertimbangkan kompleksitas relasi urban tanpa mengabaikan fondasi normatif. Dialektika yang dihasilkan bukan sekadar kompromi, melainkan proses kreatif yang menghasilkan pemaknaan baru yang tetap berakar pada nilai Qur'ani. Relevansi pendekatan ini terus teruji dalam menghadapi perubahan sosial yang semakin cepat dan beragam. Tantangan ke depan terletak pada kemampuan mengembangkan kerangka serupa yang lebih responsif terhadap dinamika kontemporer tanpa terjebak dalam reduksi nilai atau kehilangan arah normatif yang menjadi inti ajaran.

Transformasi Relasi Suami-Istri dan Otoritas Keluarga dalam Perspektif *Tafsir Al-Azhar*

Perubahan struktur sosial perkotaan memicu reposisi relasi suami-istri dari pola hierarkis menuju konfigurasi yang lebih dialogis dan setara secara fungsional. Intensifikasi pendidikan, partisipasi ekonomi perempuan, serta diferensiasi peran

profesional membongkar asumsi lama mengenai monopoli otoritas domestik oleh suami. *Tafsir al-Azhar* menghadirkan pembacaan yang menekankan integrasi tanggung jawab moral, bukan dominasi struktural, melalui penafsiran ayat-ayat keluarga yang berporos pada prinsip keadilan, amanah, dan keseimbangan hak-kewajiban. Pergeseran ini tidak menghapus struktur kepemimpinan, melainkan mengubah basis legitimasinya dari superioritas gender menuju kualitas tanggung jawab yang dapat diverifikasi secara praksis dalam kehidupan rumah tangga.

Reinterpretasi konsep *qiwamah* dalam *Tafsir al-Azhar* menjadi titik kunci dalam transformasi ini. Hamka (1990) tidak memaknai *qiwamah* sebagai lisensi absolut untuk dominasi, melainkan sebagai amanah kepemimpinan yang melekat pada tanggung jawab nafkah, perlindungan, dan pembinaan moral. Konsepsi ini membuka ruang bagi pembacaan kontekstual di mana distribusi fungsi kepemimpinan dapat bersifat dinamis sesuai kapasitas aktual pasangan. Ketika perempuan memiliki kompetensi ekonomi dan manajerial yang signifikan, relasi keluarga berpotensi mengadopsi pola kooperatif yang menempatkan otoritas sebagai hasil negosiasi rasional (Karimli et al., 2021). Legitimasi kepemimpinan bergeser dari basis normatif yang statis menuju konstruksi etis yang responsif terhadap realitas sosial. Perspektif ini memperlihatkan fleksibilitas hermeneutik *Tafsir al-Azhar* dalam menjaga relevansi ajaran tanpa mereduksi prinsip dasar. Otoritas tetap berakar pada teks suci, namun aktualisasinya bergantung pada kualitas praksis yang menjamin tercapainya kemaslahatan keluarga.

Transformasi menuju relasi kolaboratif juga berimplikasi pada redefinisi mekanisme pengambilan keputusan domestik. Model dominatif yang menempatkan suami sebagai penentu tunggal cenderung digantikan oleh proses musyawarah yang melibatkan pertimbangan rasional kedua pihak (Osamor & Grady, 2018). *Tafsir al-Azhar* menegaskan pentingnya syura sebagai prinsip etis dalam interaksi keluarga, sehingga keputusan tidak hanya sah secara normatif, melainkan juga legitimit secara moral (Hamka, 1990). Proses deliberatif ini menghasilkan distribusi otoritas yang lebih adaptif terhadap kompleksitas kehidupan urban, di mana isu ekonomi, pendidikan anak, dan mobilitas sosial menuntut keterlibatan aktif kedua pasangan. Relasi yang berbasis dialog memperkuat stabilitas keluarga karena mengurangi potensi konflik akibat ketimpangan kuasa. Otoritas berfungsi sebagai struktur koordinatif yang memastikan setiap keputusan mencerminkan kepentingan kolektif dan nilai keadilan. Transformasi ini sekaligus menunjukkan kompatibilitas antara prinsip Qur'ani dan tuntutan rasionalitas modern.

Dimensi moral dalam *Tafsir al-Azhar* memainkan peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara transformasi relasi dan kontinuitas normatif. Hamka (1990) menekankan etika tanggung jawab sebagai inti kepemimpinan keluarga, sehingga perubahan struktur relasi tidak mengarah pada relativisme nilai. Setiap bentuk kolaborasi tetap dibatasi oleh prinsip amanah, kejujuran, serta komitmen terhadap kesejahteraan anggota keluarga. Pendekatan ini mencegah interpretasi

ekstrem yang menganggap kesetaraan identik dengan penghapusan peran. Relasi suami-istri tetap mengandung diferensiasi fungsi, namun diferensiasi tersebut bersifat komplementer, bukan hierarkis. Otoritas dipahami sebagai tanggung jawab moral yang harus dipertanggungjawabkan secara etis, bukan sebagai privilese yang melekat secara inheren. Penekanan pada nilai ini memperlihatkan konsistensi *Tafsir al-Azhar* dalam mengintegrasikan perubahan sosial dengan prinsip keislaman, sehingga transformasi relasi tidak menghasilkan disorientasi normatif dalam keluarga Muslim perkotaan.

Konteks profesionalitas modern memperkuat kebutuhan akan reinterpretasi kepemimpinan keluarga yang berbasis kompetensi. Realitas urban menunjukkan distribusi peran ekonomi yang semakin simetris antara suami dan istri, sehingga klaim otoritas berbasis gender kehilangan relevansi empiris (Budiman, 2021). *Tafsir al-Azhar* menyediakan kerangka konseptual yang memungkinkan adaptasi ini melalui penekanan pada kualitas individu sebagai dasar legitimasi kepemimpinan. Kepemimpinan keluarga dipahami sebagai fungsi yang dapat dijalankan oleh pihak yang memiliki kapasitas terbaik dalam situasi tertentu, tanpa mengabaikan struktur tanggung jawab normatif. Pendekatan ini menciptakan model kepemimpinan fleksibel yang mampu merespons dinamika pekerjaan, mobilitas sosial, serta tekanan ekonomi perkotaan. Otoritas tidak bersifat statis, melainkan dapat bergeser sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama.

Implikasi lebih lanjut dari transformasi ini tampak pada restrukturisasi relasi kuasa dalam keluarga yang mengarah pada distribusi tanggung jawab yang lebih seimbang. Relasi kolaboratif mendorong internalisasi nilai kesalingan, sehingga setiap anggota keluarga memiliki peran aktif dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga. Hamka (1990) menegaskan pentingnya kesadaran moral sebagai fondasi relasi, sehingga keseimbangan otoritas tidak hanya bergantung pada kesepakatan rasional, tetapi juga pada komitmen spiritual. Integrasi antara rasionalitas dan moralitas menghasilkan model keluarga yang adaptif sekaligus berakar pada nilai agama. Transformasi ini memperlihatkan perubahan relasi suami-istri harus dimaknai sebagai peluang untuk memperkuat kualitas interaksi berbasis keadilan dan tanggung jawab. Otoritas keluarga mengalami redefinisi yang menempatkan kepemimpinan sebagai proses kolektif yang berorientasi pada kemaslahatan bersama, tanpa melepaskan landasan normatif yang bersumber dari Al-Qur'an.

Penutup

Kepemimpinan keluarga menurut Al-Qur'an menampilkan kerangka normatif yang menempatkan tanggung jawab, keadilan, serta relasi komplementer sebagai fondasi utama kehidupan rumah tangga. *Tafsir al-Azhar* karya Hamka menegaskan kepemimpinan suami bukan dominasi absolut, melainkan amanah moral yang menuntut kebijaksanaan, musyawarah, serta penghormatan terhadap peran istri sebagai mitra setara. Realitas keluarga urban menunjukkan pergeseran signifikan

menuju pola relasi yang lebih egaliter, dipengaruhi modernisasi, pendidikan, serta partisipasi ekonomi perempuan, sehingga melahirkan dialektika dinamis antara nilai normatif Al-Qur'an dan praktik sosial kontemporer. Temuan ini memperkaya pengembangan studi tafsir kontekstual sekaligus memperluas horizon sosiologi keluarga Islam melalui integrasi dimensi normatif dan empiris. Secara praktis, pemaknaan kepemimpinan yang adaptif relevan bagi keluarga modern guna membangun relasi harmonis berbasis tanggung jawab bersama. Keterbatasan tampak pada pendekatan kualitatif berbasis literatur klasik serta fokus analisis yang belum menjangkau variasi konteks lintas budaya secara luas. Ke depan, eksplorasi komparatif antar tafsir, pendekatan interdisipliner, serta studi lapangan pada beragam komunitas urban dan rural diperlukan guna menguji konsistensi temuan serta memperdalam pemahaman tentang transformasi kepemimpinan keluarga Islam.

Daftar Pustaka

- Adams, M. M., & Miller, J. G. (2022). The flexible nature of everyday reciprocity: reciprocity, helping, and relationship closeness. *Motivation and Emotion*, 46(4), 461–475. <https://doi.org/10.1007/s11031-022-09949-y>
- Awalul, A., Mawariza, P., Syah, J. A., & Nuranisah, N. (2025). Maqāṣidī's Approach to Qiwāmah and Nafaqah. *al Hairy / Journal of Islamic Law*, 1(2), 161–179. <https://doi.org/10.64344/hry.v1i2.69>
- Barassi, V. (2020). Datafied times: Surveillance capitalism, data technologies and the social construction of time in family life. *New Media & Society*, 22(9), 1545–1560. <https://doi.org/10.1177/1461444820913573>
- Budiman, I. (2021). The Islamic Perspective on The Improvement of Family Economy in The New Normal. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5(1), 252. <https://doi.org/10.22373/sjhhk.v5i1.8389>
- Buyukkececi, Z., Levanon, A., Fasang, A. E., Kraus, V., & Saburov, E. (2025). Women's work-family trajectories and earnings by ethno-religious groups in Israel: More equality in the public sector? *Advances in Life Course Research*, 63, 100659. <https://doi.org/10.1016/j.alcr.2025.100659>
- Carlson, M. W., & Hans, J. D. (2020). Maximizing benefits and minimizing impacts: dual-earner couples' perceived division of household labor decision-making process. *Journal of Family Studies*, 26(2), 208–225. <https://doi.org/10.1080/13229400.2017.1367712>
- Evans, A. (2018). Cities as Catalysts of Gendered Social Change? Reflections from Zambia. *Annals of the American Association of Geographers*, 108(4), 1096–1114. <https://doi.org/10.1080/24694452.2017.1417820>
- Fatimah, A., & Ikram, R. (2025). Redefining Qiwāmah as a Transformative Approach to Gender Role Sharing and Redressing Toxic Masculinities in Muslim Communities. *AL-ĪMĀN Research Journal*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.63283/IRJ.03.02/01>

- Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. California: University of California Press.
- Glavin, P., Schieman, S., & Bierman, A. (2024). From flexibility to unending availability: Platform workers' experiences of work–family conflict. *Journal of Marriage and Family*, 86(3), 574–592. <https://doi.org/10.1111/jomf.12977>
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge: MIT Press.
- Hamka. (1990). *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.
- Hochschild, A. R., & Machung, A. (1989). *The Second Shift: Working Parents and the Revolution at Home*. New York: Viking.
- İsrafiloğlu, F. (2025). The Qur'an and Value Conflicts in Marriage in the Modern Era. *Diyanet İlmi Dergi*, 61(4), 1341–1376. <https://doi.org/10.61304/did.1723044>
- Karimli, L., Lecoutere, E., Wells, C. R., & Ismayilova, L. (2021). More assets, more decision-making power? Mediation model in a cluster-randomized controlled trial evaluating the effect of the graduation program on women's empowerment in Burkina Faso. *World Development*, 137, 105159. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105159>
- Loginov, D. (2021). Traditional and new patterns of today's urban youth demographic behavior. *Population*, 24(2), 165–178. <https://doi.org/10.19181/population.2021.24.2.15>
- Lubiewska, K., Głogowska, K., Sümer, N., Żegleń, M., & Mądrzycka-Borska, Z. (2023). Is distanced mothering a neglectful or normative parenting strategy? Evidence from three countries. *International Journal of Intercultural Relations*, 96, 101842. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2023.101842>
- Mansour, S., Saleh, E., & Al-Awadhi, T. (2020). The Effects of Sociodemographic Characteristics on Divorce Rates in Oman: Spatial Modeling of Marital Separations. *The Professional Geographer*, 72(3), 332–347. <https://doi.org/10.1080/00330124.2020.1730196>
- Mujahidin, A., Itmam, M. S., & Rofiq, A. C. (2024). The Dynamic of Contextualization in Indonesian Qur'anic Tafsirs: A Comparative Study of Tafsir Al-Azhar and Tafsir Al-Mishbāh on The Story of The Prophet Moses. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 25(2), 221–246. <https://doi.org/10.14421/qh.v25i2.5397>
- Munirah, N., Norhayatun, N., Hasan, A. M., & Mahfodz, W. H. (2026). From Maryam to Musawah: The Evolution of Muslim Feminist Thought in Advocating Family Rights and Equality in Islamic Law. *Arba: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/10.64691/72afxb53>
- Osamor, P. E., & Grady, C. (2018). Autonomy and couples' joint decision-making in healthcare. *BMC Medical Ethics*, 19(1), 3. <https://doi.org/10.1186/s12910-017-0241-6>
- Pluut, H., Ilies, R., Su, R., Weng, Q., & Liang, A. X. (2022). How social stressors at work influence marital behaviors at home: An interpersonal model of work–family spillover. *Journal of Occupational Health Psychology*, 27(1), 74–88.

<https://doi.org/10.1037/ocp0000298>

- Pratiwi, E. A. S., Othman, A., Daulay, R. H., Sahara, D., & Rahman, Z. (2026). Women's Leadership in the Quran: A Critical Analysis of Contemporary Muslim Interpretation and Social Practice. *Arba: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 120–140. <https://doi.org/10.64691/ms4sxm74>
- Rasool, A. (2024). The Dynamics Of Urbanization On Family Structures: A Study In Islamabad, Pakistan. *Migration Letters*, 21(S13), 1279–1295. <https://doi.org/10.59670/ml.v21iS13.11657>
- Rawluk, A., Ford, R., Anderson, N., & Williams, K. (2019). Exploring multiple dimensions of values and valuing: a conceptual framework for mapping and translating values for social-ecological research and practice. *Sustainability Science*, 14(5), 1187–1200. <https://doi.org/10.1007/s11625-018-0639-1>
- Saaka, S. A., & Luginaah, I. (2025). Do women's autonomy lessen the brunt of unequal household responsibilities in the patriarchal context of semi-arid Northern Ghana? *PLOS One*, 20(10), e0335142. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0335142>
- Salam, M. T., Nasution, R. A., & Siregar, A. D. (2026). Thematic Analysis of Men's Roles in Gender Justice According to the Quran: Domestic and Public Perspectives. *Arba: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 177–194. <https://doi.org/10.64691/xehgtr46>
- Tafkir, M., Hidayat, Z., & Ayob, M. A. bin. (2026). Deconstructing Patriarchy in Islam: An Analysis of Asma Barlas' Unreading Concept of the Patriarchal Interpretation of the Quran. *Arba: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1), 20–34. <https://doi.org/10.64691/tqrng369>
- Visscher, A. H., Boele, S., & Denissen, J. J. A. (2023). Unraveling the Bidirectional Associations between Parental Knowledge and Children's Externalizing Behavior. *Journal of Youth and Adolescence*, 52(4), 794–809. <https://doi.org/10.1007/s10964-023-01743-4>
- Yuki, M., & Schug, J. (2020). Psychological consequences of relational mobility. *Current Opinion in Psychology*, 32, 129–132. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2019.07.029>